



2016

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

B2

Tambahkan Berita Negara R.I Tanggal 26 Agustus 2016 No. 68

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DIDIEK HARTANTYO |
| 2. Jabatan | : DIREKTUR - KEUANGAN - DIREKTORAT KEUANGAN |
| 3. NHK | : 108516 |
| 4. Alamat Kantor | : Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1, BANDUNG |
| 5. Tanggal Pelaporan | : 5 Desember 2013, 16 Maret 2016 |

Status Laporan

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 390 m2 & 300 m2, di Kota SURABAYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010

	5 Desember 2013	16 Maret 2016
Rp.	2.250.750.000	Rp. 2.250.750.000
Rp.	2.250.750.000	Rp. 2.250.750.000

B. HARTA BERGERAK

**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

1. Mobil, merk TOYOTA KIJANG, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001

Rp.	710.000.000	Rp. 710.000.000
Rp.	90.000.000	Rp. 90.000.000

	5 Desember 2013	16 Maret 2016
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 489.419.200	Rp. 20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 6.372.076.757	Rp. 7.829.378.376

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

